

# Fasilitas Kepabeanaan

## MATERI

- KAWASAN BERIKAT
- GUDANG BERIKAT
- KEMUDAHAN IMPOR  
TUJUAN EKSPOR



**KAWASAN BERIKAT  
(KB)**

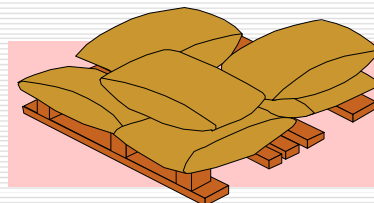
Bangunan, tempat dan atau kawasan dengan batas – batas tertentu yg didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

# Kawasan Berikat

- Tujuan :
  - Memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa penangguhan pembayaran bea masuk;
  - Penangguhan pembayaran bea masuk yaitu peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan.
  - Untuk memperlancar arus barang impor atau ekspor serta meningkatkan produksi dalam negeri

## FASILITAS KB

- ❑ IMPOR BRG MODAL /PERALATAN UNTUK DIPAKAI OLEH PKB TERMASUK PKB MERANGKAP PDKB BM & PDRI NYA DITANGGUHKAN
- ❑ BARANG ATAU BAHAN ASAL IMPOR:
  - ❑ PENANGGUHAN BEA MASUK
  - ❑ PEMBEBASAN CUKAI
  - ❑ TIDAK DIPUNGUT PPN, PPnBM & PPh
- ❑ PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK BARANG KENA CUKAI DARI DPIL DIBEBAHKAN DARI PUNGUTAN CUKAI
- ❑ BARANG – BARANG DIATAS BUKAN BARANG UNTUK DIKONSUMSI



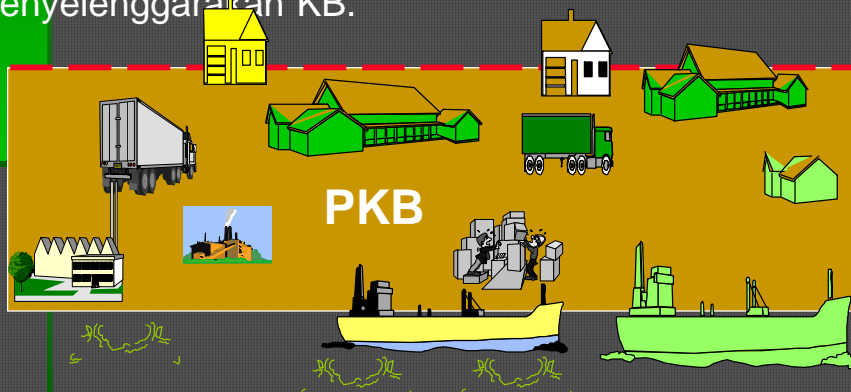
## PERSYARATAN IZIN KB



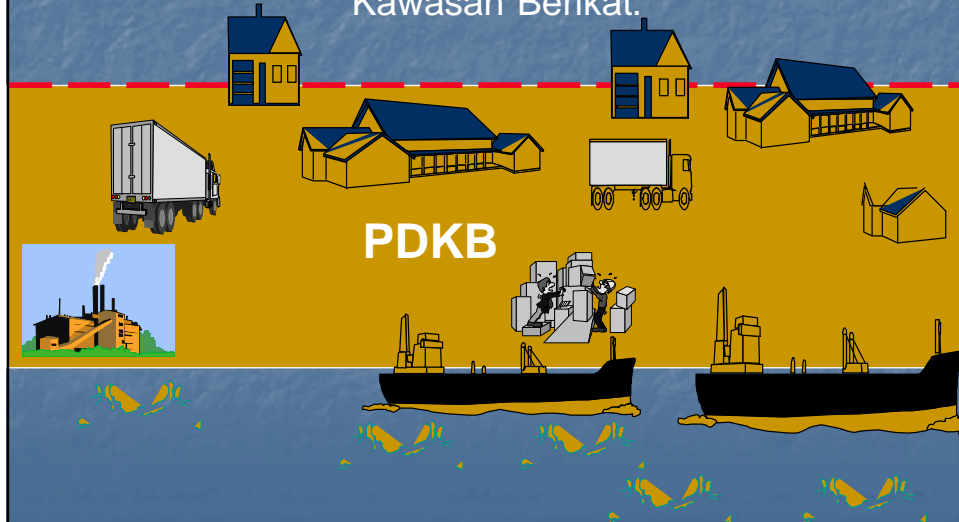
- MEMPUNYAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN DENGAN BATAS YANG JELAS ( PAGAR PEMISAH)
- SIU INDUSTRI, ANALIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN IZIN YG DIWAJIBKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
- NPWP, PKP, DOMISILI DAN SPT PPh TERAKHIR
- RENCANA TATALETAK KB
- PETA LOKASI
- AJUKAN PERMOHONAN KE MENKEU VIA DJBC

## SIAPA PKB ?

Penyelenggara KB (PKB) adalah perseroan terbatas, koperasi berbadan hukum atau yayasan yg memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB.

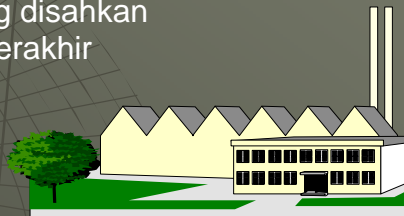


Pengusaha di KB (PDKB)  
adalah perseroan terbatas, koperasi berbadan hukum  
yang melakukan kegiatan usaha pengolahan di  
Kawasan Berikat.



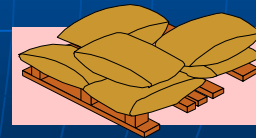
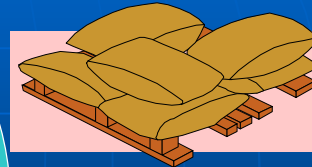
## PDKB

Syarat :  
Bukti kepemilikan lokasi dilampiri rekomendasi  
PKB  
F/C SIUP industri dan lainnya yg terkait  
F/C akte pendirian PT/koperasi yg disahkan  
F/C NPWP, SPT PPh Badan yg terakhir  
Peta lokasi  
Saldo awal bahan baku



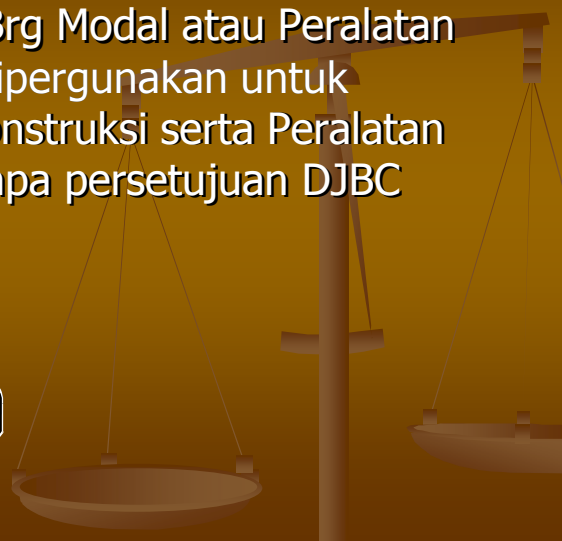
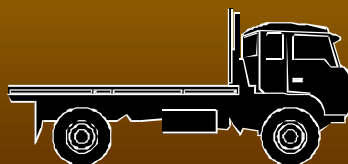
## FASILITAS IMPOR PDKB

- 1. Penangguhan BM & PDRI tidak dipungut atas impor barang modal & peralatan kantor yang dipakai di Perusahaan Dalam KB, juga yg berhubungan dengan proses produksi**
- 2. Pemasukan BKP dari DPIL tidak dipungut PDRI**
- 3. PKB & PDKB bertanggung jawab atas BM & PDRI atas barang yg dimasukkan atau dikeluarkan dari Kawasan Berikat, kecuali:**
  - a. musnah tanpa sengaja**
  - b. diekspor dan atau direekspor**
  - c. dimasukkan ke Kawasan Berikat lain.**



## LARANGAN BAGI PKB

- Memindahkan Brg Modal atau Peralatan asal impor yg dipergunakan untuk membangun Konstruksi serta Peralatan Perkantoran tanpa persetujuan DJBC



## PENGELUARAN BARANG DARI PDKB KE DPIL

1. **PENGELUARAN BRG YG TELAH DIOLAH DARI PDKB KE DPIL, DIKENAKAN BM, CUKAI, PPN, PPnBM dan PPh Ps 22 SEPANJANG THD PENGELUARAN TSB TIDAK DITUJUKAN KPD PIHAK YG MEMPEROLEH FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENANGGUHAN BM, CUKAI, dan PDRI;**
2. **DASAR PERHITUNGAN PUNGUTAN NEGARA :**
  - a. **BM berdasarkan Tarif Bhn Baku dg Pembebanan dan Kurs Valuta Asing yg berlaku pd saat pengeluaran brg dan N P Bhn Baku pd saat impor;**
  - b. **Bila pembebanan tarif BM untuk Bhn Baku lebih tinggi dari brg hasil olahan, BM didasarkan pd pembebanan tarif BM unt brg hasil olahan yg berlaku pada saat dikeluarkan dari PDKB;**
  - c. **Cukai berdasarkan per-undang2an Cukai yg berlaku;**
  - d. **PPN, PPnBM dan PPh Ps 22 berdasarkan per-undang2an Perpajakan yg berlaku.**
3. **PEMERIKSAAN PABEAN DI KB DILAKSANAKAN OLEH DJBC**

## KEWAJIBAN PDKB

- **MEMBUAT PEMBUKUAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI, MENYIMPAN BUKU, CATATAN ATAS PEMASUKAN, PEMINDAHAN & PENGELUARAN BRG DAN/ATAU BHN DI KB**
- **MEMBERI KODE UNTUK SETIAP JENIS BARANG**
- **MENYEDIKAKAN RUANGAN DAN SARANA KERJA UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI**
- **MEMBUAT LAPORAN 3 BULANAN KPD KA KPBC SELAMBAT-LAMBATNYA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA TTG : PERSEDIAAN RM; WIP & FG.**
- **BERTANGGUNG JAWAB THD BM, CUKAI, DAN PDRI YANG TERUTANG ATAS BARANG YANG DIMASUKKAN ATAU DIKELUARKAN DARI KB**
- **MENYERAHKAN DOKUMEN YG BERKAITAN DGN KEGIATAN KB, BILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH DJBC DAN/ATAU DITJEND. PAJAK**

## **Pengeluaran barang ke DPIL**



- **Sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan, untuk barang yang tidak memerlukan proses lebih lanjut dan dapat berfungsi sendiri tanpa bantuan barang lainnya serta digunakan oleh konsumen akhir;**
- **Sebanyak-banyaknya 60% dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan, untuk barang lainnya.**

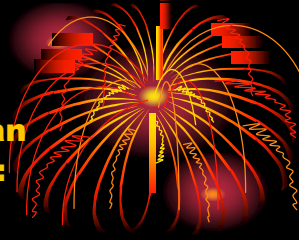
## **Selisihnya ?**



- **Selisih nilai hasil produksi dari barang yang dikeluarkan tersebut di atas, dikeluarkan untuk diekspor, diolah lebih lanjut ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE, dan/atau ke PKB / PDKB lain atau dimusnahkan di bawah pengawasan DJBC.**



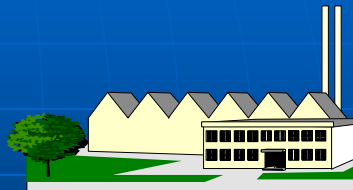
### **Pelanggaran ketentuan pengeluaran barang :**



- 1. pengurangan jumlah prosentase penjualan ke DPIL untuk periode tahun berikutnya;**
- 2. pencabutan daftar putih PDKB dan /atau tidak dapat mengajukan permohonan persetujuan daftar putih selama satu tahun; dan/atau**
- 3. pembekuan izin PDKB berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor yang mengawasi PDKB yang bersangkutan.**

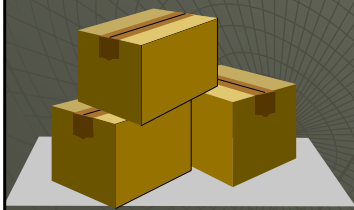
## **GUDANG BERIKAT**

- Adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas batas tertentu yg didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merk/label, pemotongan atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang asal impor untuk tujuan dimasukan ke DPIL, KB atau diekspor tanpa ada Pengolahan





## FASILITAS GUDANG BERIKAT



- ♦ BARANG ASAL IMPOR YANG DIMASUKAN KE GB OLEH PPGB DIBERIKAN PENANGGUHAN BM, PEMBEBASAN CUKAI , TIDAK DIPUNGUT PPN; PPnBM DAN PPH
- ♦ BRG ATAU PERALATAN ASAL IMPOR YG DIGUNAKAN DI GB , BM DITANGGUHKAN, PDRI DIBEBASKAN
- ♦ BARANG TUJUAN KONSUMI DI GB DIKENAKAN BM

## Larangan

1. Barang dalam GB harus milik importir/pengusaha GB sendiri
2. Dilarang menimbun barang milik pihak ketiga
3. Dilarang menimbun barang untuk ekspor.



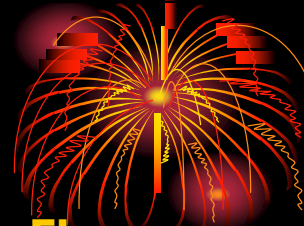
## Syarat Mendirikan GB

- a. Memiliki izin usaha di bidang jasa pergudangan dan/atau izin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
- b. Memiliki NPWP, penetapan sebagai PKP, dan SPT PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
- c. Memiliki bukti/dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas dan peralatan kerja guna mendukung terlaksananya kegiatan di GB;
- d. Memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);

## Syarat Mendirikan GB

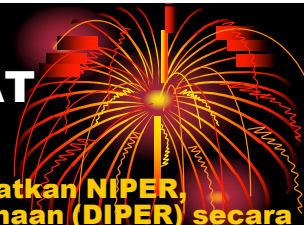
- e. Memiliki Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang berbentuk badan hukum Indonesia yang telah ditandatangan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Memiliki peta lokasi/tempat yang akan dijadikan GB dan lay out GB;
- g. Berita Acara Pemeriksaan lokasi yang dibuat oleh Kepala Kantor;
- h. Memiliki sistem administrasi pembukuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;

# KITE



- **Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.**

## CARA MENDAPAT KITE



- **Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NIPER, dengan melampirkan Data Induk Perusahaan (DIPER) secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Wilayah secara elektronik.**
- **Hasil penelitian administratif dan lapangan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya DIPER secara lengkap dan benar.**
- **Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan NIPER diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara.**
- **Terhadap Perusahaan yang telah disetujui permohonan NIPER-nya, wajib:**
- **memasang papan nama di lokasi perusahaannya dengan tulisan:**
- **NAMA PERUSAHAAN : ..... NIPER :  
.....**
- **memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor**
- **Wilayah setiap perubahan data yang terdapat dalam DIPER.**

## KETENTUAN FASILITAS KITE



- **NIPER DAPAT DICABUT APABILA TIDAK ADA KEGIATAN IMPOR SELAMA :**
  - 12 bl berturut – turut sejak diterbitkan
  - 12 bl berturut – turut sejak realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke KB terakhir
- **Terhadap perusahaan penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, yang NIPER-nya dicabut, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang, bunga serta sanksi wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencabutan.**

## FASILITAS KITE

- Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.
- Terhadap barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian.
- Terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

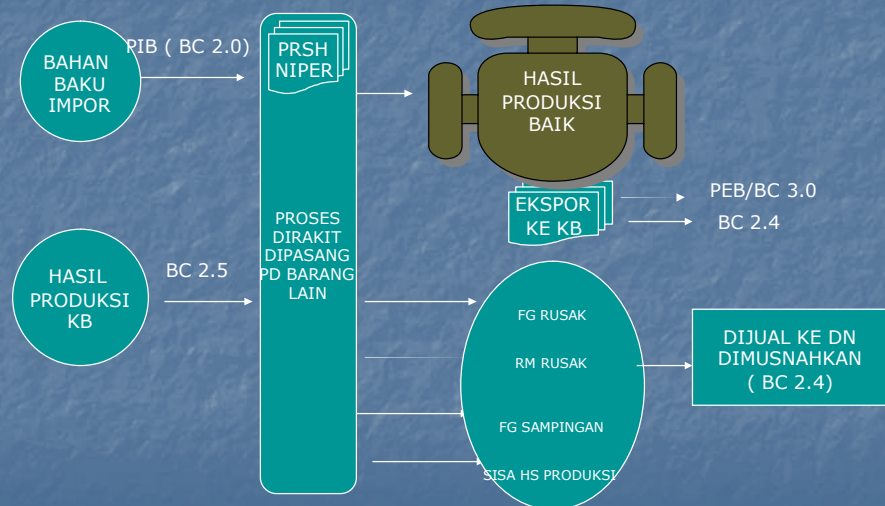
## FASILITATS KITE

- Pembebasan dan/atau pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang dikecualikan terhadap bahan bakar, minyak pelumas dan barang modal.
- Terhadap hasil produksi dari Perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat.
- Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor oleh Perusahaan dapat dijual ke DPIL atau dimusnahkan.

## KEWAJIBAN KITE

- Perusahaan yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, wajib menyerahkan PIB beserta jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dalam PIB, sebelum barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
- Jaminan tersebut diserahkan kepada Kantor Wilayah dengan disertai PIB yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
- Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap PIB.
- STTJ dikirimkan secara elektronik ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang/bahan baku asal impor.”

## FASILITAS PEMBEBASAN



## KETENTUAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI KE DPIL

- HARUS SUDAH MELAKUKAN EKSPOR
- MAKSIMAL 25% DARI JUMLAH EKSPOR DAN ATAU PENYERAHAN KE KB OLEH PEMEGANG NIPER
- BAYAR BM, DG KLASIFIKASI BRG JADI; PEMBEBANAN DAN NILAI PABEAN BAHAN BAKU SAAT DIIMPOR + BUNGA 2% / BL SEJAK PENDAFTARAN PIB
- PDRI DIPUNGUT SEBESAR NILAI IMPOR + SANKSI 2%/BL MAKSIMAL 24 BL
- PENJULAN HARUS TERLAKSANA DLM JANGKA WAKTU 24 BL SEJAK IMPOR BH BAKU



## KETENTUAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI KE DPIL

- APABILA PENJUALAN LEBIH DARI 25%, ATAS KELEBIHANNYA :
  - DIKENAKAN SANKSI BERUPA DENDA 100% BM & CUKAI + BUNGA 2% SEJAK TGL PENDAFTARAN PIB
  - MEMBAYAR PPN, PPnBM SESUAI NILAI IMPOR + SANKSI 2%/BL MAKSIMAL 24 BL

## PENJUALAN PRODUK SAMPINGAN

- Penjualan ke DPIL hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan:
- mengajukan BC 2.4 kepada Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;
- dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;
- membayar BM sebesar 5% dari harga jual;
- membayar Cukai sesuai ketentuan tarif yang berlaku;
- membayar PPN dan PPnBM sebesar nilai impor; dan
- pembayaran BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dilakukan pada saat penyerahan barang ke DPIL."



## PEMUSNAHAN HASIL PRODUKSI SAMPINGAN

- Pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan:
- mengajukan BC 2.4 ke[ada Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;
- dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;
- dilakukan pengawasan pemusnahan oleh Pejabat;
- tidak dilakukan penagihan pemusnahan oleh pejabat;
- hasil pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara.

## JALUR PRIORITAS

- Fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat



JALUR PRIORITAS  
UNTUK SIAPA ?

**Jalur Prioritas  
diberikan kepada  
importir produsen  
dan importir umum  
yang memenuhi  
persyaratan  
tertentu.**

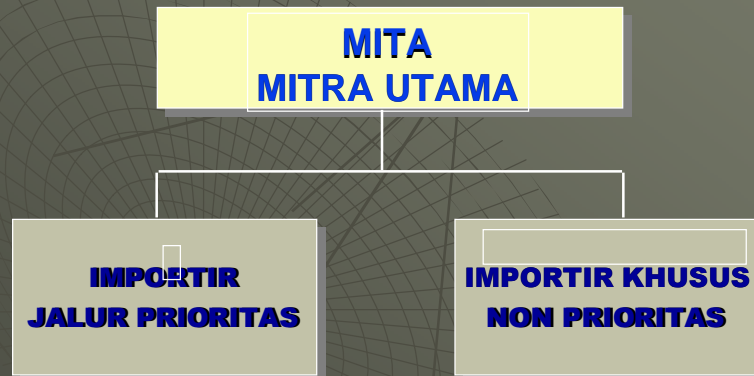


### **DASAR PEMIKIRAN JALUR PRIORITAS**

- ♦ FAIR TREATMENT:  
MEMPERLAKUKAN IMPORTIR  
SECARA ADIL DAN CEPAT  
BERDASARKAN REPUTASINYA
- ♦ MENDORONG IMPORTIR UNTUK  
PERBAIKAN REPUTASINYA
- ♦ MEMBERIKAN INSENTIF  
KEUANGAN KEPADA IMPORTIR  
PRODUSEN YG MENGIMPOR BAHAN  
BAKU, BAHAN BANTU DAN BARANG  
MODAL
- ♦ MENGALOKASIKAN SDM DJBC  
SECARA EFISIEN UNTUK  
KEGIATAN PENGAWASAN THD  
IMPORTIR YG BERESTIMASI TINGGI



MITRA UTAMA  
PERATURAN DJBC No: 24/BC/2007  
17 AGUSTUS 2007



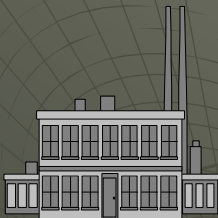
## JALUR PRIORITAS

- ◆ **PERSYARATAN :**
  - Nature of business jelas
  - Tdk pernah menyalahgunakan fasilitas dibidang kepabeanan selama satu tahun
  - Tdk pernah memberitahukan salah jumlah, jenis dan nilai pabean selama satu tahun
  - Telah diaudit oleh akuntan publik yg menyatakan perusahaan tdk mendapatkan opini disclaimer
  - Tdk mempunyai tunggakan utang kepadd DJBC
- ◆ **MENGAJUKAN PERMOHONAN KPD DIRJEN BC MELALAU KAKANWIL DJBC**

## PENGAJUAN PERMOHONAN PRIORITAS

### ♦ Ditujukan ke DJBC dg dilampiri:

- Hasil audit terakhir dari KAP
- Hasil audit DJBC terakhir atau pernyataan belum pernah atau sedang diaudit DJBC
- Data Kegiatan impor dan pelanggaran yg dilakukan selama dalam satu tahun terakhir dg bentuk sesuai contoh
- SOP pembuatan, pembayaran dan penyerahan (transfer ) PIB yg selama ini dimiliki dan dijalankan perusahaan
- Surat pernyataan sesuai contoh
- Modul importir untuk pembuatan PIB
- Foto copy Sertifikat Ahli Kepabeanaan yg dimiliki perusahaan
- Garansi perusahaan
- Surat lainnya yg dpt mendukung permohonan ( e.g: company profil ; ISO; WP yg patuh dll )



**Tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap Jalur Merah dan Jalur Hijau, kecuali terhadap:**

- barang impor sementara; barang reimpor
- barang yg terkena NHI
- brg tertentu yg ditetapkan DJBC
- Pemeriksaan fisik dpt dilakukan di GD Importir (tanpa permohonan)
- Pengeluaran brg dpt dilakukan dg trucklossing ( tanpa permohonan)
- Prenotification ( tanpa permohonan)
- Pembayaran berkala ( IP )

Fasilitas ?

Oh !

**FASILITAS IJP**





## PELUNASAN FASILITAS PEMBAYARAN BERKALA



- ♦ BM DAN PDRI DILUNASI PADA SETIAP AKHIR BULAN SETELAH BULAN PENDAFTARAN PIB DG KETENTUAN:
  - ♦ Bila akhir bulan jatuh hari minggu atau hari libur nasional pembayaran pada hari kerja sebelumnya
  - ♦ Pembayaran atas importasi bl November dan sampai tanggal 20 Desember dilakukan paling lama pd tgl 20 Desember dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya
  - ♦ Pembayaran untuk importasi yg dilakukan setelah tgl 20 s.d tgl 31 Desember dilakukakan dg pembayran biasa,

**Orang yg memenuhi  
persyaratan  
dan ditetapkan oleh Ka KPU  
a.n Direktur Jenderal BC**

**Non  
Prioritas**

**MITA ??**



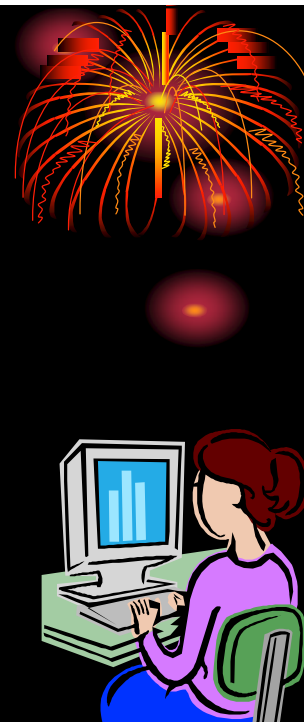
- Persyaratan MITA

1. Dapat berhubungan dg sistem jaringan elektronik DJBC
2. Pola bisnisnya jelas
3. Sistem pengendaliannya jelas untuk menjamin keakuratan data
4. Memiliki rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean dan / atau cukai yang baik
5. Telah diaudit oleh KAP yang menyatakan bhw perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 tahun terakhir dan



- Persyaratan MITA

6. Selalu memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan impor dan ekspor dari instansi teknis terkait
7. Untuk perusahaan yg mendapat fasilitas ( bebas, penangguhan ; keringanan ) harus melakukan penata usahaan dan pengelolaan sediaan barang yg dibuat sedemikian rupa sehingga dpt diketahui jenis, spesifikasinya, jumlah pemasukan dan pengeluaran barang yg berkaitan dg fasilitas kepabeanan yg diperoleh digunakan.



## PENGAJUAN PERMOHONAN MITA

Ditujukan ke Ka KPU dg dilampiri:

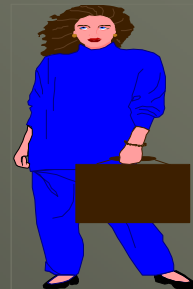
- a. Laporan keuangan 2 th terakhir yg telah diaudit oleh KAP
- b. SOP pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor
- c. SOP pembuatan, pembayaran impor, dan transfer PIB dan/atau PEB yg selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan.
- d. Surat pernyataan sesuai contoh dlm Lampiran II P-24/BC/2007
- e. Surat lainnya yg dpt mendukung permohonan ( e.g: company profil ; ISO; WP yg patuh dll )
- f. Daftar PPJK yg digunakan
- g. Permohonan sesuai contoh



Tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap Jalur Merah dan Jalur Hijau, kecuali terhadap:

1. barang impor sementara;
  2. barang reimpor
  3. barang yg terkena NHI
  4. brg tertentu yg ditetapkan DJBC
  5. Pemeriksaan fisik dpt dilakukan di GD Importir (tanpa permohonan)
- Tidak perlu menyerahkan hard copy PIB/PEB
  - Mendapat akses Client Coordinator
  - Pemutakhiran data registrasi importir

**HAK MITA**





**MITA wajib :**

- 1. Memenuhi ketentuan yg ditentukan instansi teknis sebelum mengajukan PIB**
- 2. Menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor impor secara elektronik**
- 3. Tidak memberikan dan/atau meminjamkan modul importir kepada pihak/perusahaan lain**
- 4. Melaporkan kehilangan dan/atau penyalahgunaan modul importir pd kesempatan pertama**
- 5. Memberitahukan perubahan nama PPJK yg diberikuasa kepada kantor BC**
- 6. Menyampaikan nama pegawai perusahaan yg ditunjuk untuk berhubungan dengan cc**

**KEWAJIBAN  
MITA**



**MITA DICABUT:**

- a. APABILA SALAH SATU PERSYARATANNYA TIDAK DIPENUHI**
- b. Ka KPU a/n DirJen BC MENCABUT SEMENTARA ( SELAMA 6 BL)**
- c. PENCABUTAN SEMENTARA DAPAT DIPERPANJANG SELAMA PENANGANAN PELANGGARAN MASIH DLM PROSES PENYELESAIAN**
- d. PENCABUTAN BERAKHIR SETELAH PERMASALAHAN TELAH SELESAI**

**Bisa  
dicabut  
?**

**MITA DICABUT**



## KEMUDAHAN DIBIDANG PELAYANAN PABEAN DI BIDANG IMPOR (Pemberitahuan Pendahuluan)

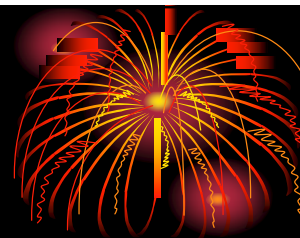


### Importir MITA Prioritas

- **Dapat mengajukan PIB Prenotification tanpa mengajukan permohonan**
- **Menyerahkan laporan periodik PIB Prenotification yang memuat nomor dan tanggal manifest ke Koordinator Pelayanan pengguna jasa ( client coordinator )**



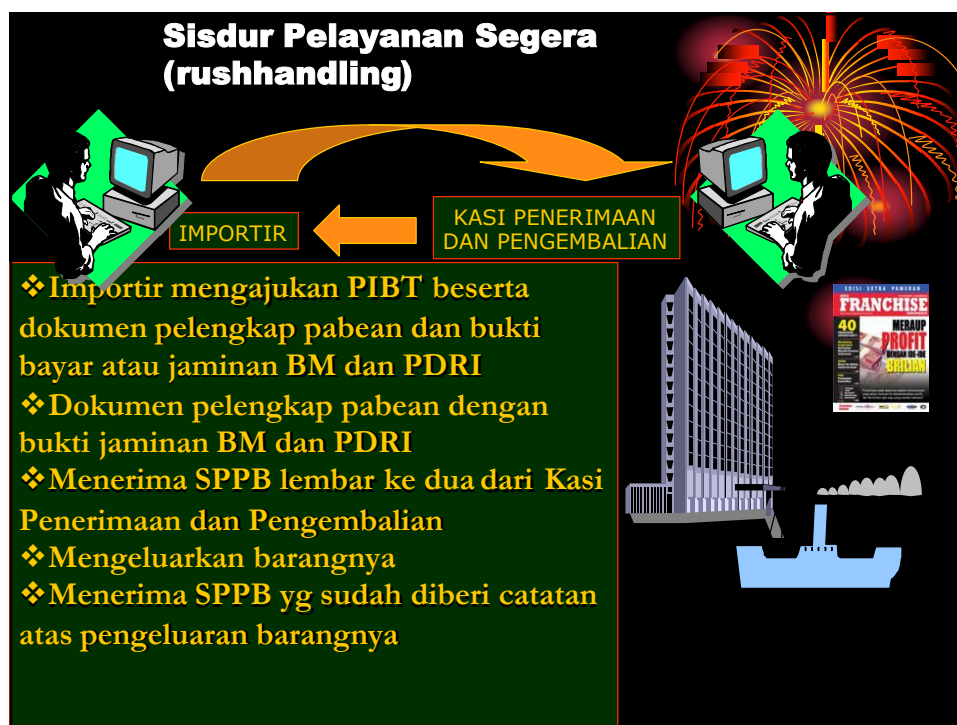
## PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN (Prenotification)




- **Diberikan kepada :**
  - ✓ Importir jalur prioritas ; dan
  - ✓ Importir lainnya, dengan persetujuan Kabid PFPC
- **Importir mengajukan permohonan dgn melampirkan :**
  - ✓ Copy/fax AWB dan/atau HWB, B/L dan/atau HB/L yg ditandasahkan oleh pengangkut


Pelayanan PIB  
sesuai Tatakerja  
penyelesaian brg  
impor untuk dipakai







- **Importir wajib menyerahkan pemberitahuan pabean impor dan melunasi bea masuk, cukai dalam rangka impor, dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak barang impor dikeluarkan dan diselesaikan dengan PPIK ( Pemberitahuan Pabean Impor Khusus )**
- **Importir yang tidak melunasi bea masuk, cukai dalam rangka impor dan/atau pajak dalam rangka impor atas barang impor dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari wajib membayar bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.**
- **Dalam hal bea masuk, cukai dalam rangka impor dan/atau pajak dalam rangka impor, atas barang impor tersebut tidak dilunasi, jaminan disahkan dan selanjutnya barang /ruk**



- ***Customs Advice* adalah petunjuk tentang cara penghitungan nilai pabean atas barang yang akan diimpor, yang diberikan kepada importir atas permintaan importir yang bersangkutan.**
- ***Valuation Ruling* adalah informasi tentang penetapan nilai pabean atas barang yang pernah diimpor, untuk digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean barang identik yang akan diimpor oleh importir yang sama dari pemasok**

## prosedur

- Untuk memperoleh *Customs Advice* terhadap importasi yang merupakan transaksi jual beli atau untuk memperoleh *Valuation Ruling*, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan dilampiri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengimporan barang bersangkutan dengan menggunakan formulir .
- Untuk memperoleh *Customs Advice* terhadap importasi yang bukan merupakan transaksi jual beli, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan dilampiri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

**SELESAI  
TERIMA KASIH & MOHON  
MAAF ATAS SEGALA  
KEKURANGNYA  
JAKARTA  
17 OKTOBER 2008**

